

RINGKASAN

Tuntutan reformasi yang mewarnai kehidupan demokrasi kita turut membangkitkan kembali semangat perjuangan emansipasi kaum perempuan di Indonesia dan kita dapat melihat bahwa perjuangan tersebut telah membuahkan banyak hasil. Disisi lain problema rendahnya kualitas sumber daya manusia secara nasional yang cukup mendasar adalah sumber daya kaum perempuan. Banyak kalangan yang menduga rendahnya sumber daya perempuan di Indonesia terjadi karena ketidakadilan, system social budaya tradisional yang lebih berpihak kepada kaum laki-laki, serta adanya penafsiran terhadap ajaran agama yang lebih menguntungkan dan menempatkan kaum laki-laki setingkat lebih tinggi dari kaum perempuan.

Upaya perubahan nasib kaum perempuan tidaklah memadai jika dilakukan hanya melalui upaya advokasi dan penyadaran dikalangan perempuan saja, namun harus masuk melalui sistem pengambilan kebijakan negara dengan menyuarakan aspirasi di parlemen. Posisi perempuan di Dewan Perwakilan analog dengan posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang tentunya berimbang pada keanggotaannya dalam memerankan fungsi kedewaanannya yang belum seimbang dengan besarnya tuntutan masyarakat.

Disisi lain peran DPD sangat lemah, belum sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, padahal kehadiran DPD sebagai lembaga legislatif diharapkan dapat berperan menjembatani dan memperjuangkan kepentingan daerah dan aspirasi masyarakat daerah dengan pusat dalam perumusan kebijakan Nasional. Namun karena peran dan wewenang DPD sangat lemah dalam UUD 1945, maka efektifitas dan hasil kerja DPD khususnya DPD asal Riau belumlah dapat memenuhi harapan masyarakat Riau.

Dari data yang diperoleh dari hasil Susenas 2004 memperlihatkan bahwa penduduk laki-laki Riau pada tahun 2004 berijazah lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dengan adanya fenomena diatas, maka dapat kita lihat apakah Peran Perempuan Parlemen Indonesia Asal Riau Dalam Menunjang Pembangunan di Propinsi Riau yang dilihat dari pelaksanaan fungsi bidang legislasi, bidang anggaran, dan bidang pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik.

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru Propinsi Riau. Waktu penelitian dilakukan akhir Bulan Oktober 2007 hingga akhir Maret 2008. Populasi adalah perempuan parlemen Indonesia asal Riau sebanyak 4 orang dan Masyarakat kota Pekanbaru sehingga sampel penelitian ini adalah sebanyak 239 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :wawancara terpimpin, observasi, angket (questioner),sedangkan metode yang digunakan adalah survey dengan cara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Peran Perempuan Parlemen Indonesia Asal Riau Dalam Menunjang Pembangunan di Propinsi Riau yang dilihat dari tiga indikator yaitu : fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, belum dilaksanakan secara keseluruhan dengan baik, berada pada kategori cukup baik dimana rata-rata tanggapan responden terhadap pertanyaan yang diajukan banyak menyatakan ragu-ragu dengan alasan bahwa mereka merasa Peran Perempuan Parlemen Indonesia Asal Riau Dalam Menunjang Pembangunan di Propinsi

Riau dilaksanakan belum secara baik. Sementara itu faktor yang menyebabkan belum dapat dilaksanakannya Peran Perempuan Parlemen Indonesia Asal Riau Dalam Menunjang Pembangunan di Propinsi Riau menurut penulis adalah masih kurangnya koordinasi dan kerjasama yang baik dari masing-masing Perempuan Parlemen Indonesia Asal Riau dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam menunjang pembangunan di Propinsi Riau.